

EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh:
Maria Yoane Kristella
NIM. E42010046

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : nonaoscar.yk@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menilai hasil dari evaluasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang. Penulisan Skripsi ini berdasarkan atas pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang yang belum terselenggara secara maksimal. Penelitian ini menggunakan model Penelitian Kualitatif dengan Metode Penelitian Evaluasi, adapun subyek penelitian Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabid Cipta Karya, Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan sampah oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang belum terealisasi secara maksimal dan perlunya perbaikan pengelolaan sampah agar lebih baik serta terwujudnya pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok yang diselenggarakan oleh pemerintah, melaksanakan pembangunan, pembinaan terhadap masyarakat dan melaksanakan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dengan mewujudkan Bengkayang sehat 2020.

Kata-kata Kunci: Evaluasi Pengelolaan, Efektivitas, Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan.

EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT IN THE FIELD OF HUMAN SETTLEMENTS IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS IN BENGKAYANG

Abstract

Thesis writing is intended to assess the results of the evaluation conducted by the Waste Management Division of Human Settlements in the Public Works Department at Bengkayang. Thesis writing is based on waste management in Bengkayang are not held to the fullest. This study uses a model of Qualitative Research Method Evaluation Research, while the subject of research Dept of Public Works, Head of Human Settlements, subfields Sanitation, Parks and Cemetery Bengkayang. The results showed that the evaluation of waste management by the Department of Human Settlements Division of Public Works in Bengkayang yet realized its full potential and the need for improvement in order to better waste management and the creation of services that meet the basic tasks are organized by the government, development, development of the society and obligations Department of Public Works for Human Settlements to realize healthy Bengkayang 2020.

Keywords: Evaluation of Management, effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy of

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Hampir di setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan sampah. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam yang harus dikelola dengan baik.

Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi masalah nasional, perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukannya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Namun pada kenyataannya pengelolaan sampah ini masih belum terealisasi dengan baik dalam mewujudkannya meski sudah dibuatnya peraturan dalam hukum. Karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan menganggap masalah kebersihan bukanlah yang utama. Dalam menangani sampah memang bukan hal yang mudah, karena akan selalu dihadapkan dengan kendala. Adapun yang menjadi kendala itu dilihat masyarakat yang kurang

menyadari dan tidak cinta terhadap lingkungan, meningkatnya jumlah penduduk beserta bertambahnya kebutuhan manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai bahkan pemerintah yang bergerak di bidang itu sendiri belum melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Menurut Fenny (2010:14) sampah Rumah Tangga dibedakan menjadi 3 jenis :

Sampah basah (*garbage*) sampah yang terdiri atas bahan organik, sifatnya mudah busuk jika dibiarkan dalam keadaan basah. Misalnya sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan dan dedaunan, 2. Sampah kering (*rubbish*) yaitu sampah yang terdiri dari bahan anorganik yang sebagian besar atau seluruh bagiannya susah membusuk. Misalnya plastik, pecahan kaca, karet, dan botol, 3. Sampah berbahaya misalnya paku, bekas lampu neon, sisa racun serangga atau racun tikus, obat kadaluarsa dan batu baterai bekas.

Secara umum, sampah adalah segala sisa bentuk penggunaan yang dibuang dan tidak digunakan lagi. Dan cenderung sampah dapat menimbulkan hal yang negatif jika tidak dengan benar dalam

menanganinya. Selain dapat merusak pemandangan mata, sampah juga menyebabkan pencemaran udara dengan menimbulkan bau yang tidak sedap disekitarnya dan bisa menjadi sarang bibit penyakit. Hal ini tentulah menjadi persoalan yang bukan hanya sebelah pihak saja untuk menyelesaikannya, diperlukannya kesadaran yang benar-benar tulus untuk menjadi pahlawan kebersihan ini.

Kabupaten Bengkayang adalah kabupaten yang sedang berkembang, baik populasinya maupun ekonominya. Pertumbuhan yang pesat ini menyebabkan kebutuhan setiap orang juga meningkat. Terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, volume sampah juga mengalami peningkatan dan hal ini yang menyebabkan perkembangan yang terjadi di Bengkayang tidak terlaksana dengan baik, terutama yang bersangkutan dengan kebersihannya. Dasar hukum adalah landasan utama yang mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada bagian kebersihan. Adapun landasan atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2010, tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Berita acara serah terima penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang nomor: 660.1/109/LH-A pada tanggal 1 April 2010 serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan adanya landasan hukum yang mengatur kegiatan tugas dan fungsi pada Bidang Cipta Karya ini, diharapkan agar pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang ini dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan landasan hukum dalam rencana pengelolaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bertujuan agar pengelolaan ini dapat memberikan manfaat ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien maka dibentuklah Dasar Hukum yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 2 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah. Berita acara serah terima Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang nomor: 660.1/109/LH-A pada tanggal 1 April 2010 dan Barang Inventaris Aset Daerah untuk kegiatan Kebersihan dan Pertamanan dengan diadakannya alat-alat berat untuk kelancaran dalam mengelola sampah berupa 2 Dump Truck Container, 6 Container, 4 Dump Truck, 7 Motor Roda Tiga, 1 Mesin Pengolah Sampah, 1 Bangunan Rumah Alat Pengelolaan Sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan dalam mengelola persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 11 tahun 2012 tentang Rancangan Pengelolaan Sampah.

Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor 102 tahun 2006 tentang Perubahan Nomenklatur Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) menjadi Dinas Pekerjaan Umum yang mengatur Struktur Dinas Pekerjaan Umum, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 13 tahun 2007 dan diperjelas dengan peraturan Bupati Bengkayang nomor 16 tahun 2007

tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang, pada tahun 2010 mengalami perubahan lagi dengan beberapa penambahan yaitu pada Seksi Kebersihan dan UPTD Kebakaran dan Perkuburan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 13 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang berdasarkan struktur, tugas pokok, fungsi dan tata kerja maka terbentuklah tugas pokok Bidang Cipta Karya menurut Peraturan Daerah yang bertugas untuk penyiapan bahan, perumusan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pembinaan perencanaan teknis serta pelaksanaan di Bidang Cipta Karya.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Bengkayang pada tahun 2011 sebesar 91.537 M² dan pada tahun 2019 mendatang diperkirakan akan meningkat menjadi 128.279 M². Pada data tersebut dijelaskan bahwa karena meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan volume sampah bertambah juga. Jumlah penduduk di Wilayah Perkotaan Bengkayang adalah ±256,331 Jiwa (Data Sensus tahun 2013). Pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang saat ini baru menjangkau wilayah perkotaan (urban) yang ada di Kota Bengkayang dengan luas wilayah 167,06

Km². Tingkat pelayanan kebersihan daerah perkotaan ±19,284 Jiwa. Sampah yang terangkut ke TPA Magmagan Kecamatan Lumar baru 70% dari seluruh produksi sampah total Kota Bengkayang sebesar ±43,894 m³/hari di tahun 2011 dan prediksi ±45,781% atau meningkat ±1,887%. Selain itu beberapa fenomena yang terjadi adalah menumpuknya sampah di beberapa titik seperti tepian sungai sebalu, selokan, sekolahan, terminal bus, pasar teratai dan pasar tengah juga salah satu penyebab dikatakannya bahwa Kabupaten Bengkayang mengalami masalah dengan kebersihan terutama sampah.

2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dibuat agar penelitian lebih terarah, sehingga berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yakni “Apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten di Bengkayang sudah mencapai hasil yang memuaskan?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hasil pengelolaan sampah oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang.

4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan terhadap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan yang terkait evaluasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku Penyelenggaran Pemerintahan Daerah khususnya Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Abdi Masyarakat dan Negara sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, selanjutnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah Bengkayang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Evaluasi merupakan hasil akhir dalam suatu program kebijakan atau kegiatan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan proses dan proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengamatinya sehingga dalam penilaian akhir dapat membuahkan hasil yang baik dan terlihat jelas perbedaannya. Begitu pula dalam pengelolaan sampah yang telah

menjadi kebijakan dalam setiap program di daerah, untuk menjalankan program tersebut dan melihat hasil yang maksimal dari program tersebut maka di perlukannya tahap-tahap dalam menyelesaikannya.

Dunn (dalam Rien, 2013:10) berpendapat bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan apabila suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu. Jika evaluasi dilakukan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka hasil (*outcome*) dan dampaknya tidak tampak.

Dengan adanya penaksiran, pemberian angka dan penilaian diharapkan evaluasi mampu menjadi acuan berjalannya suatu keputusan dalam pengambilan kebijakan.

Rien (2013:12) mengatakan esensi dari evaluasi adalah untuk menyediakan umpan balik (*feedback*), yang mengarah pada hasil yang baik menurut ukuran nyata dan obyektif. Pada hakekatnya, tujuan evaluasi adalah untuk perbaikan (bila perlu, bukan dalam rangka pembuktian). Dua hal yang ingin diungkapkan melalui evaluasi adalah : a. Keluaran Kebijakan (*policy output*), yaitu apa yang dihasilkan dengan adanya perumusan kebijakan; dan

b. Hasil/dampak kebijakan (*policy outcomes/consequences*), yaitu akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan diterbitkan dan diimplementasikannya suatu kebijakan. Keputusan dalam pengambilan suatu kebijakan diperlukan agar dalam melaksanakan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan, meski akan banyak kendala yang dihadapi.

Sementara itu, Jones (dalam Widodo, 2010:124) menjelaskan evaluasi kebijakan lebih operasional yaitu sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator yang dikembangkan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2008:126) yaitu :

- a) Efektifitas, yaitu apakah yang diinginkan telah tercapai.
- b) Efisiensi, Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- c) Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
- d) Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

- e) Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
- f) Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Keenam indikator ini digunakan untuk mengukur bagaimana pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang ini sehingga dalam pengambilan kebijakannya dapat di evaluasi dengan baik mengenai penilaiannya. Namun dari enam indikator, peneliti hanya menggunakan empat indikator inti yaitu Efektivitas, Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif dengan Metode Evaluasi. Metode ini diperlukan agar dalam melakukan pencarian, pengolahan dan menyimpulkan hasil penelitiannya tepat. Karena dalam penelitiannya peneliti ingin mengevaluasi berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Lokasi penelitian di Kabupaten Bengkayang dengan subjek penelitian yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan

Perkuburan serta 10 orang informan lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 200:429). Selain itu menurut Siagian (1997:151) mengatakan bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara menyelesaikannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Sejalan dengan pernyataan tersebut dikatakan bagaimana Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang menyelesaikan tugasnya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bengkayang ini dengan beberapa prinsip yaitu ukuran waktu, nilai dan ketelitian. Jadi, suatu pekerjaan yang dikatakan efektif apabila

hasil pekerjaan tersebut tercapai sesuai yang diharapkan dengan memperhatikan waktu, proses, kegiatan dan hasil yang didapatkan dari pekerjaan tersebut.

Dari keterangan yang diungkapkan oleh Kasubbid Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan di atas dijelaskan bahwa tidak semua kecamatan yang di Kabupaten Bengkayang dilayani secara merata. Hal ini dikatakannya karena pola konsumsi masyarakat yang ada di kecamatan lain tidak begitu menghasilkan atau menambah volume sampah. Selain itu dikarenakan minimnya dana, petugas dan SDM yang tersedia yang menyebabkan tidak semua kecamatan terlayani sepenuhnya secara menyeluruh.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum belum melaksanakan tugasnya secara keseluruhan dalam melayani masyarakat dalam hal ini adalah pengelolaan sampah. Dan saat peneliti melakukan observasi di Kecamatan Sanggau Ledo bahwa benar kenyataannya tidak terdapat TPS dan sejauh pemantauan yang penulis lakukan selama di Kecamatan Sanggau Ledo tidak adanya sumber-sumber atau titik-titik sampah yang menumpuk seperti yang ditemukan saat melakukan pemantauan di Kecamatan Bengkayang.

2. Kecukupan

Menurut Dunn (2000:430) kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam menyelenggarakan tugas yang telah dilimpahkan kepada suatu instansi untuk menyelesaikan kewajibannya tidak pernah terlepas dari proses dan penilaian akhir. Kecukupan dalam hal ini berhubungan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh SKPD terkait Dinas Pekerjaan Umum, hal yang dikatakan cukup apabila tugas yang dilaksanakan oleh instansi terkait ini berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh yang menikmati hasilnya yaitu masyarakat secara umum.

Adapun hal-hal yang dikatakan cukup dalam pengelolaan sampah ini yaitu, terlayannya masyarakat dalam pengelolaan sampah, teratasinya volume sampah yang meningkat, terlaksananya program yang telah dicanangkan, terwujudnya harapan dari Peraturan Daerah Bengkayang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang Persampahan di Indonesia, sarana dan prasarana yang memadai untuk mengelola sampah, dengan

petugas dan anggaran dana yang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh Dunn (2000:609) fungsi evaluasi yaitu pertama dan yang paling penting adalah evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua memberikan sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target tersebut.

3. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2000:437). Kemudian Dunn (2000:437) mengatakan kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menganggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian responsivitas bersumber pada data organisasi dan masyarakat, data organisasi dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis

kegiatan dan program organisasi. Sedangkan data masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan yang dituju, namun juga berhubungan dengan tanggapan untuk mendengarkan, baik itu keluhan, pengaduan atau bahkan penilaian yang baik. Dalam hal ini masyarakat memberi tanggapan kepada Dinas Pekerjaan Umum mengenai pelayanan yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam melaksanakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum khususnya Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan yang menangani persoalan persampahan selalu berusaha menerima apapun kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak mereka. Beberapa pengaduan yang disampaikan dari masyarakat sepenuhnya dijadikan bahan evaluasi oleh Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan selaku tim teknis yang melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang.

4. Ketepatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa instansi terkait yang dilimpahkan kepada Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum khususnya Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan sudah menjalankan tugasnya dan dari pengelolaan tersebut masyarakat sudah merasakan manfaatnya, meskipun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yaitu sosialisasi mengenai program kebijakan yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tersebut belum terealisasi secara merata sehingga masyarakat belum memahami dan mengetahui adanya peraturan daerah tersebut. Selain itu dalam pengelolaannya juga di Kabupaten Bengkayang masih menggunakan teknik open dumping, sehingga pemanfaatan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya belum terlaksana.

Indikator Ketepatan pada Evaluasi Pengelolaan Sampah oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang sudah terlaksana dengan baik meski tidak secara maksimal.

D. PENUTUP

a) Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Efektivitas. Pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang berjalan dengan baik meskipun tidak menggunakan teknik pengelolaan sampah 3R. Karena dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah dengan teknik open dumping. Namun dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait dan petugas kebersihan menjadikan lingkungan di Kabupaten Bengkayang tidak lagi tercemar oleh sampah.
2. Kecukupan. Pada indikator ini disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum belum dikatakan berhasil. Karena dalam layanan untuk persampahan ini tidak secara menyeluruh dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang dan yang dapat terlayani hanya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Hal ini disebabkan karena minimnya dana dan petugas yang tidak terlatih.
3. Responsivitas. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, aspek responsivitas (tanggapan) masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dalam melayani dan mengelola persampahan di Kabupaten Bengkayang menuai hasil yang baik dan respon yang positif dari

masyarakat. Namun meskipun demikian yang menjadi catatan penting dari Pemerintah yaitu untuk menyadarkan masyarakat yang masih bandel dan tidak mengindahkan aturan tentang pengelolaan sampah sehingga hasilnya dapat lebih maksimal lagi.

4. Ketepatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa instansi terkait yang dilimpahkan kepada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum khususnya Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan sudah menjalankan tugasnya dan dari pengelolaan tersebut masyarakat sudah merasakan manfaatnya, meskipun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yaitu sosialisasi mengenai program kebijakan yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tersebut belum terealisasi secara merata sehingga masyarakat belum memahami dan mengetahui adanya peraturan daerah tersebut. Selain itu dalam pengelolaannya juga di Kabupaten Bengkayang masih menggunakan teknik open dumping, sehingga pemanfaatan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah

sebagai sumber daya belum terlaksana. Indikator Ketepatan pada Evaluasi Pengelolaan Sampah oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang sudah terlaksana dengan baik meski tidak secara maksimal.

b) Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah agar pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang terlaksana secara efektif maka pemerintah perlu bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah mengingat lokasi dan volume sampah yang tidak terdeteksi dengan pasti jumlahnya. Teknik pengelolaan sampah terpadu 3R juga perlu dilakukan agar dalam pengelolaannya sampah bisa bermanfaat, tidak hanya untuk menjaga kesehatan lingkungan tetapi juga menambah kreatifitas dan wawasan masyarakat mengenai bahaya sampah. Selain itu, dikarenakan petugas pelayanan sampah yang kurang maka Dinas yang bersangkutan perlu menambahkan petugas tersebut. Retribusi persampahan juga ditetapkan agar dalam pengelolaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Moleong, Lexy. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T Remaja R. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Karya.

Sugiyono. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2010.

Haro, Ayu. 2004. *Pola Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak*. Pontianak: Skripsi

Siagian, Sondang P. 1983. *Administrasi Pembangunan, Konsep, dan Strategi*. Jakarta: P.T Bumi Aksara.

Wahyudi.2012.*Implementasi Manajemen Persampahan di Kota Pontianak*. Pontianak: Skripsi

Wijaya, Fenny Aryati. 2010. *Sampah Rumah Tangga*. Pontianak: Skripsi

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Fakultas Isipol. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant D. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan*

Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Putra, Fadilah. 2008. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yessi. 2009. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Medan: Skripsi.

Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat*. Semarang: Tesis.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.

Pengelola dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Prodi IP FISIP UNTAN: Pontianak

2. Peraturan-Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bengkayang*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 03 Tahun 2013 Tentang *Retribusi Kebersihan Kabupaten Bengkayang*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah di Indonesia*.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tentang *Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang*.

Peraturan Daerah Kabuapten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan*

***Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang.***

Berita Acara Serah Terima Penggunaan
***Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Bengkayang Nomor:
660.1/109/LH-A pada tanggal 1 April
2010.***

Bengkayang Dalam Angka Tahun 2011





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MARIA YOANE KRISTELLA
NIM / Periode lulus : E42010046 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN
Email address/HP : nonaoscar.yk@gmail.com / 085750612320

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BIDANG CIPTA KARYA PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN BENGKAYANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....



H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 11 Maret 2015

(MARIA YOANE KRISTELLA)